



“(Tema: 8 (pengabdian kepada masyarakat))”

**“PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA
AANGGARAN KEUANGAN SD SMP MUHAMMADIYAH DI KOTA
YOGYAKARTA”**

Oleh

“Wahyu Manuhara Putra”
“Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”
“wahyu_mp45@yahoo.com”

ABSTRAK

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta. LPPK merupakan lembaga yang melakukan pengawasan keuangan terhadap Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Sedangkan tugas utama LPPK Kota Yogyakarta membina dan melakukan pengawasan keuangan pada AUM di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Berdasarkan observasi awal, permasalahan utama yang dihadapi mitra dalam proses penyusunan anggaran keuangan, yaitu belum adanya panduan dan Standart Operating Procedure mengenai tata kelola anggaran. Melalui kegiatan ini kami telah melakukan sosialisasi pentingnya penyusunan SOP anggaran sekolah. Sedangkan terkait dengan pengelolaan anggaran keuangan sekolah, program ini menyelenggarakan pendampingan dan perbaikan tata kelola keuangan sekolah dan pembuatan buku panduan SOP pengelolaan anggaran keuangan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu LPPK memiliki SOP dan buku panduan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran sekolah.

Kata kunci: *LPPK, SOP, anggaran, sekolah.*

ABSTRACT

Partners in this community service activity are Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK/ Institute of Trustees and Financial Supervisors) of the Muhammadiyah Regional Executive (PDM) Yogyakarta. LPPK is an institution that conducts financial oversight of the Muhammadiyah Business Charity (AUM). Whereas the main task of LPPK in Yogyakarta is to develop and conduct financial supervision in AUM Yogyakarta, specifically elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). Based on preliminary observations, the main problems faced by partners in the process of preparing the financial budget, is the absence of guidelines and Standard Operating Procedures regarding budget governance. We have conducted socialization on the importance of preparing school budget SOPs. Whereas related to the school financial budgets, this program organizes mentoring and improvement in school financial governance and made SOP manual for managing school financial budgets. The output of the implementation of this activity is that the LPPK has SOPs and manuals in the preparation and management of school budgets.

Keywords: *LPPK, SOP, budget, school.*

PENDAHULUAN



Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LPPK PDM) Kota Yogyakarta. Fungsi dari LPPK ini adalah membantu Persyarikatan Muhammadiyah dalam merancang perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keuangan rutin dan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program. Sampai saat ini LPPK PDM Kota Yogyakarta masih berupaya untuk memperbaiki tata kelola sistem keuangan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kali terdapat perubahan pada aturan dan sistem pembukuan sekolah. Sehingga diharapkan Sekolah Muhammadiyah akan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab secara maksimal sehingga berdampak kepada kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya akan menjadikan Sekolah Muhammadiyah yang benar-benar unggul.

Beberapa langkah Persyarikatan Muhammadiyah bagi pencapaian tata kelola keuangan sekolah adalah menerbitkan SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.37/KEP/I.0/C/2012 mengenai menempatkan dana amal usaha Muhammadiyah di bank syariah mitra Muhammadiyah serta SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.38/KEP/C.I.0/C/2012 yang menjelaskan penetapan iuran anggota, infaq tetap, infaq siswa, dan mahasiswa serta alokasi dana persyarikatan sebagai pembiayaan aktivitas secara mandiri, maka pengelolaan keuangan bagi Amal Usaha Muhammadiyah harus sesuai dengan Syariat Islam, terpadu dan dalam kerangka mewujudkan keuangan yang berorientasi pada transparansi dan tanggung jawab. Demikian juga rekomendasi dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta yang meminta agar pengelolaan kekayaan diselenggarakan dengan sistem yang Baku, Utuh, Transparan dan Auditabel. Dilanjutkan lagi pada Mukhtamar Muhammadiyah ke 43 di Banda Aceh yang menegaskan agar Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Muhammadiyah dapat membakukan format laporan keuangan.

Berdasarkan hal di atas maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta mensyaratkan bahwa sekolah harus menerapkan pengelolaan keuangan yang baku terintegrasi sesuai dengan kaidah *organizational public governance* dan standar akuntansi organisasi nirlaba. Namun dalam kenyataan sampai sekarang tidak banyak dan masih dijumpai Sekolah Muhammadiyah mengelola keuangannya belum terpadu, transparan dan auditabel.

LPPK Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebenarnya sudah membuat dan mengaplikasikan sistem keuangan yang sesuai standar SAK bagi sekolah-sekolah namun hasilnya sekolah belum secara optimal mengaplikasikan sistem keuangan. Adapun permasalahan belum optimalnya penerapan tata kelola keuangan tersebut kemungkinan disebabkan oleh: Pertama, belum ada pemahaman dan kesadaran tentang arti pentingnya tatakelola keuangan organisasi. Kedua, belum adanya integrasi organisasi sekolah Muhammadiyah dan persyarikatan Muhammadiyah dalam pengelolaan keuangan. Masing-masing pihak sepertinya memiliki arah mengelola keuangan sendiri-sendiri, tidak banyak dilakukan koordinasi, sehingga akibatnya hubungan tata organisasi anggaran sekolah dan persyarikatan belum optimal. Ketiga, hampir semua sekolah belum memiliki kebijakan



perencanaan program sekolah yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran sekolah. Anggaran dibuat hanya digunakan sebagai aktivitas formal organisasi, belum menyentuh esensi adanya anggaran sebagai acuan seluruh aktivitas akademik sekolah. Keempat, belum memiliki sistem pembukuan atau administrasi keuangan yang memadai dalam arti ketidakseragaman sistem akuntansi yang digunakan seluruh sekolah.

Oleh karena itu diperlukan pendampingan bagi sekolah dalam menerapkan tata kelola anggaran keuangan sekolah. Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perbaikan tata kelola anggaran keuangan dan pengembangan sistem anggaran ini.

METODE PENELITIAN

Prioritas masalah yang telah teridentifikasi LPPK PDM Kota Yogyakarta serta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah yang ada diselesaikan dengan melibatkan partisipasi kedua pihak tersebut. Berikut ini adalah metoda yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah:

- Sosialisasi pentingnya mengelola keuangan AUM khususnya terkait dengan manfaat secara ekonomi dan keberlangsungan sekolah Muhammadiyah.
- Sosialisasi pemahaman anggaran terintegrasi dan pentingnya konsep tata kelola anggaran keuangan bagi LPPK dengan target kegiatan berupa pemahaman konsep dan sistem tata kelola keuangan sekolah
- Standar operating procedure pengelolaan anggaran keuangan yang terintegrasi, utuh dan baku dengan target kegiatan berupaselesaiannya panduan SOP anggaran sekolah
- Pembuatan tuknis dan juklak bagi LPPK untuk pendampingan dan pemantauan penyusunan anggaran sekolah dengan target kegiatan berupaselesaiannya panduan teknis penyusunan anggaran sekolah

Selama berlangsungnya observasi dengan LPPK dan Sekolah-sekolah dilingkungan PDM Kota Yogyakarta maka rencana kegiatan ini mengalami perubahan, yaitu penambahan aktivitas kegiatan sesuai permintaan kedua belah pihak LPPK dan sekolah. Penambahan aktivitas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bersama dengan LPPK, Perwakilan kepala Sekolah SD dan SMP Muhammadiyah Kota Yogyakarta membentuk Tim Perumus Penyusunan Peraturan Kebijakan Keuangan Sekolah untuk nantinya hasil yang diperoleh akan diusulkan kepada Persyarikatan PDM Kota Yogyakarta untuk dipertimbangkan sebagai pembaharuan Peraturan Kepegawaian dan Keuangan Sekolah Muhammadiyah.
- Dalam rapat LPPK, disepakati bahwa Tim Pengabdian Masyarakat UMY diminta untuk menyusun Buku Pedoman Keuangan SD dan SMP Sekolah. Pembuatan pedoman ini tidak



hanya difokuskan pada pedoman Tata Kelola Anggaran saja seperti yang sudah direncanakan dalam proposal pengabdian tetapi juga diminta membuat pedoman Tata Kelola Keuangan Keseluruhan untuk Sekolah Muhammadiyah, sehingga cakupan pembahasannya lebih luas, mencakup mulai dari perencanaan Anggaran Sekolah sampai dengan evaluasi dan monitoring pelaksanaan laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka penyelesaian masalah yang dijalankan untuk mengatasi beberapa persoalan dalam pengembangan SOP tata kelola keuangan dengan berfokus pada sistem dan prosedur akuntansi sesuai standar akuntansi. Solusi yang diberikan mendasarkan pada permasalahan yang sudah diperoleh pada observasi, setiap poin permasalahan akan mendapatkan solusi yang berbeda-beda. Hasil temuan observasi ini kemudian dikembangkan dalam rapat LPPK untuk mendapatkan solusinya. Langkah yang dilakukan LPPK adalah pertama: dengan menerapkan standarisasi sistem RAPBS yang baru yang berbasis komputer semi pemrograman yang telah disesuaikan dengan lingkungan dan karakteristik Sekolah Muhammadiyah, sehingga akan mendapatkan kesamaan dalam pengelolaan awal keuangan sekolah sehingga bias dilakukan pemantauan dan penilaian secara konsisten terhadap semua pelaksanaan APBS Muhammadiyah. Kedua dilakukan Perubahan Standar Akuntansi dan Tata kelola Keuangan Sekolah Muhammadiyah sesuai kaidah dan pedoman Standar Akuntansi Keuangan sehingga diharapkan pencatatan dan sistem keuangan sekolah baik yang sudah berbasis aplikasi komputer RAPBS maupun yang masih berbasis manual komputer excel tetap bisa dilakukan perbandingan dan akan menghasilkan konsistensi laporan seluruh laporan keuangan sekolah secara akuntabilitas dan transparansi.

Penyusunan Kebijakan Keuangan Sekolah

Kegiatan penyusunan kebijakan keuangan dilaksanakan dengan melibatkan Tim UMY, seluruh anggota LPPK dan perwakilan kepala sekolah yang memiliki kompetensi dalam bidang kebijakan keuangan yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Sekolah, Bendahara, Guru dan Karyawan. Dengan banyaknya jumlah sekolah dan siswa dalam aktivitas pembelajaran, perlu disusun tata kebijakan keuangan sekolah yang terstruktur dan terintegrasi pada semua Amal Usaha Sekolah Muhammadiyah. Sebagaimana dalam observasi yang telah dilaksanakan didapatkan realitas bahwa Kebijakan Keuangan Sekolah masih belum baku dan terintegrasi, walaupun sudah lama terdapat inisiasi standar kebijakan keuangan. Kenyataan tersebut perlu diperbaiki dengan memberikan langkah awal berupa pembuatan draf sistematis kebijakan keuangan. Kebijakan Keuangan ini merujuk pada standar peraturan kepegawaian Muhammadiyah dan standar akuntansi keuangan. Tim penyusunan ini telah merangkum poin utama Kebijakan Keuangan Sekolah, yaitu (1) Ketentuan



Umum; (2) Pengelola Keuangan; (3) Pengawasan dan Pengendalian; (4) Klasifikasi Sekolah; (5) Gaji Dan Tunjangan; dan (6) Jam Mengajar dan Beban Kerja



Gambar 1. Rapat Tim Penyusun Kebijakan Keuangan Sekolah



Gambar 2. Diskusi Tim Penyusun Kebijakan Sekolah

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan kebijakan keuangan dilakukan dengan penyusuna sistematika draf kebijakan keuangan skolah. Tahap pertama dilakukan pengumpulan arsip-arsip kebijakan keuangan yang sudah pernah dibuat oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tahap kedua dengan mempelajari undang-undang, peraturan dan noram etika terbaru yang mengarah kepada pemutakhiran informasi kebijakan keuangan. Sehingga hasil kebijakan ini akan lebih update dan sesuai dengan karakteristik stakeholder dan kultur sekolah sekarang ini. Setelah mendapatkan formula dalam kebijakan keuangan sekolah, hasil tersebut kemudian dipresentasikan dalam forum seluruha anggota LPPK dan semua Kepala Sekolah SD dan SMP Muhammadiyah Kota Yoogyakarta untuk mendapatkan masukan dan revisi sebelum Badan Kerjasama Sekolah yang dan Persyarikatan Muhammadiyah.



Gambar 3: Presentasi Kebijakan Keuangan Sekolah oleh Tim Penyusun

Penyusunan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan

Kegiatan Penyusunan Pedoman Standar Akuntansi Keuangandilaksanakan setelah Rapat LPPK memutuskan untuk menugaskan Tim UMY diminta membuat Panduan atau pedoman standar akuntansi keuangan Sekolah Muhammadiyah. Keputusan membuat pedoman standar ini dihasilkan setelah mendapatkan temuan dari observasi bahwa organisasi sekolah belum memiliki sistem dan prosedur pengelolalan keuangan yang baku, Format laporan keuangan serta formulir yang digunakan diantara AUM SD Muhammadiyah tidak sama dan kenyataan beberapa AUM SD dan SMP Muhammadiyah masih menggunakan sistem, kebijakan, prosedur keuangan serta konsep akuntansi yang berlainan, apalagi sistem pengendalian intern dari keuangan atau akuntansi SD Muhammadiyah yang belum maksimal.

Jumlah Sekolah yang dimiliki Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta adalah 12 sekolah untuk tingkat SLTP (SMP/MTs), dan 35 sekolah untuk tingkat SD. Jumlah amal usaha yang sedemikian banyak ini akan sangat kompleks jika setiap sekolah memiliki system dan prosedur sendiri dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu perlu disusun pedoman standar keuangan sekolah yang terstruktur dan terintegrasi pada semua Amal Usaha Sekolah Muhammadiyah. Sebagaimana dalam observasi yang telah dilaksanakan didapatkan realitas bahwa Standar Keuangan Sekolah masih belum baku dan terintegrasi, walaupun sudah lama terdapat inisiasi standar kebijakan keuangan. Kenyataan tersebut perlu diperbaiki dengan memberikan langkah awal berupa pembuatan draf Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan ini merujuk pada standar akuntansi keuangan. Tim penyusunan ini telah merangkum poin utama Kebijakan Keuangan Sekolah, yaitu : (1) Pedoman Akuntansi Laporan Keuangan Sekolah Muhammadiyah; (2) Sistem Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Sekolah Muhammadiyah; (3) Penatausahaan Anggaran Sekolah Muhammadiyah; (4) Pengendalian Internal; (5) Sistem Akuntansi Anggran; (6) Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan; dan (7) Teknis Akuntansi Keuangan Dan Pelaporan Keuangan.



PANDUAN PENGELOLAAN KEUANGAN
AMAL USAHA MUHAMMADIYAH (AUM)



**PEDOMAN AKUNTANSI
UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN
SEKOLAH MUHAMMADIYAH**

Oleh:

Wahyu Manuhara Putra, SE, Msi, Akt

Lembaga Pembina Dan Pengawas Keuangan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Jogjakarta
2019

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan Dan Ruang Lingkup.....	2
C. Referensi Penyusunan.....	3
Bab II Pedoman Umum Keuangan Sekolah Muhammadiyah.....	4
A. Karakteristik Amal Usaha Sekolah.....	4
B. Ketentuan Umum Laporan Keuangan.....	5
C. Keterbatasan Laporan Keuangan.....	10
Bab III Komponen Laporan Keuangan.....	11
A. Laporan Posisi Keuangan.....	11
B. Laporan Aktivitas.....	13
C. Laporan Arus Kas.....	15
Bab IV Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
A. Pedoman Pengelolaan Laporan Keuangan.....	18
B. Proses Penyusunan Anggaran.....	20
Lampiran-Lampiran.....	23

Gambar 4: Buku Pedoman Akuntansi dan Kebijakan Keuangan Sekolah

Program Pengabdian Masyarakat Kemitraan secara keseluruhan pada tahun 2019 menunjukkan arah yang baik. Tim pengabdian sudah melakukan beberapa tahapan seperti yang direncanakan, dimulai dari pengenalan akuntansi sampai monitoring pengimplementasian RAPBS. Kerjasama dengan tim LPPK PDM Kota Yogyakarta telah membuat sistem pembukuan keuangan sekolah model baru dan sistem keuangan komputer bagi sekolah yang dinamakan SAK (Sistem Akuntansi Keuangan). Tindak lanjutnya adalah berupa sosialisasi dan workshop serta implementasi sistem yang baru tersebut. Sampai dengan bulan Juli ini telah implementasi sistem baru RAPBS. Adapun kegiatan koordinasi yang sudah dilaksanakan dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Pertemuan 1
Pertemuan dengan LPPK PDM Kota Yogyakarta untuk sosialisasi konsep tata kelola RAPBS.
2. Pertemuan 2
Pertemuan dengan LPPK PDM Kota Yogyakarta untuk membicarakan pendampingan RAPBS.
3. Pertemuan 3
Pertemuan dengan Kepala Sekolah Berkaitan dengan Penyusunan Kebijakan Keuangan Sekolah.
4. Pertemuan 4
Pertemuan Tim Penyusunan Kebijakan Keuangan Sekolah.
5. Pertemuan 5
Pertemuan Tim Penyusunan Kebijakan Keuangan Sekolah



6. Pertemuan 6
Pencarian data awal laporan keuangan SD Muhammadiyah Danunegaran.
7. Pertemuan 7
Pertemuan Tim Penyusunan Kebijakan Keuangan Sekolah
8. Pertemuan 8
Presentasi Draf Penyusunan Kebijakan Keuangan Sekolah dengan Kepala Sekolah
9. Pertemuan 9
Pendampingan penyusunan RAPBS
10. Pertemuan 10
Pendampingan penyusunan RAPBS
11. Pertemuan 11
Pembuatan Pedoman Akuntansi Keuangan Sekolah

KESIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Sekolah Muhammadiyah, Kota Yogyakarta khususnya pada amal usaha Muhammadiyah SD dan SMP. Hasil kegiatan pengabdian ini berupa kesadaran akan pentingnya tatakelola keuangan sekolah dan pembuatan pedoman keuangan sekolah serta pedoman kebijakan keuangan sekolah. Kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan Persyarikatan PDM Kota Yogyakarta, LPPK Kota Yogyakarta dan Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta yang ikut mendorong kemajuan penyelenggaraan keuangan sekolah serta keterlibatan penuh kepala sekolah, bendahara, kasir dan guru-guru sekolah yang selalu membuka diri kemajuan sekolah membuat penyelenggaraan keuangan sekolah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan semangat dari sekolah tersebut untuk mengimplementasikan sistem keuangan komputer yang baru. Diharapkan untuk satu tahun kedepan evaluasi terhadap sistem tersebut berupa realisasi keuangan dan proyeksi anggaran bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. 1991. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Persyarikatan Muhammadiyah*. SK PP No 40/SK/1991. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. 1991. *Qaidah Lembaga Pembina Dan Pengawas Keuangan Muhammadiyah*. SK PP No 39/SK/1991. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. 1998. *Pedoman Pengurusan Keuangan, Majelis/Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Perguruan Muhammadiyah*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis P & K. Jakarta.
- Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah. 2015. *Berita resmi muhammadiyah : Tanfidz Keputusan*



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers
" Pengembangan Sumber Daya Perdesaandan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX " 19-20
November 2019
Purwokerto

Musyawarah Nasional tarjih ke-27: Keputusan Tentang Fikih Tata Kelola. Yogyakarta.